

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aartje Tehupeiory, *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012.

Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2012.

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.I (edisi kedua 1993), (Bandung: Alumni, 1993).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, (edisi revisi 2005), (Jakarta: Djambatan, 2005).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Maya Anas Taqiyyah / Atik Winanti, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997*

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sahat H.M.T. Sinaga, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, cet.1, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Cetakan ke-11, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. Jurnal-jurnal

Ardiles Eric Panget, “Penyelesaian Hak Atas Tanah yang Memiliki Hak Milik Ganda”,

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013

Iwan Permadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda*

Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian”, vol.5, 2016.

Kiki Rizki, Rini Irianti Sundary, Jafar Sidik, Lina Jamilah⁴, Yeni Yunitawati,

“*Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertipikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*”, Aktualita, Vol.

3 No. 1 2020.

Kuswanto, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang*

Tindih Kepemilikan Atas Bidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus”, Jurnal Akta, Vol. 4. No. 1, Maret 2017.

Mudzakir Iskandar Syah, S.H., M.Hum, “*Sertipikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data*

Base Pertanahan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Sudaryana, Volume 4 No.2, Maret 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan

D. Makalah

Supranowo, “Sertipikat dan Permasalahannya”, (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 9 Juli 1992), hlm.10.

E. Hasil Penelitian / Tesis

Monika Febriani Pardosi, 2017, *Tumpang Tindih Hak Penguasaan Atas Tanah Dan Upaya Penanggulangan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm1.

Sri Rahayu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda/Overlapping di Kabupaten Sukoharjo*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm1.

A. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi Nomor : 562 K/TUN/2014